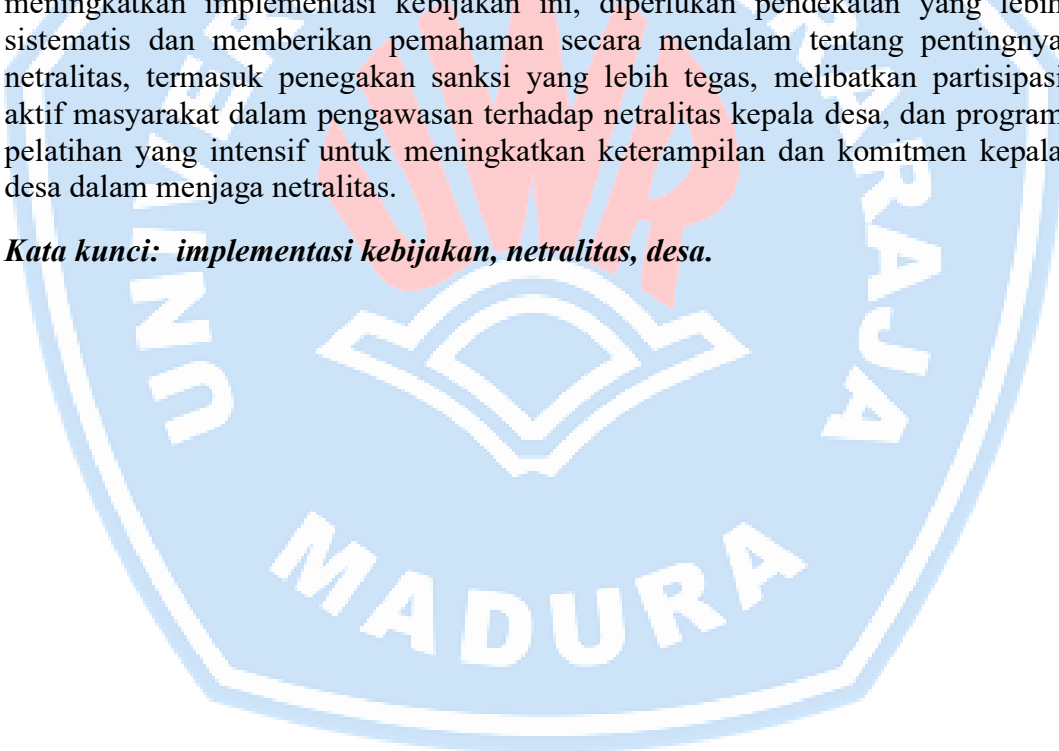


Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Mazmainan dan Paul A. Sabatier. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan fokus 1) implementasi kebijakan. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan. 3) Perilaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan netralitas kepala desa masih menghadapi tantangan yang signifikan. Adanya tekanan dari pihak eksternal maupun internal sehingga kepala desa sulit untuk mematuhi netralitas yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2014 dengan bukti adanya salah satu perangkat desa yang tidak netral. Penelitian juga mengidentifikasi tekanan politik dari partai politik, hubungan kekeluargaan, dan intervensi pemerintah sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan kepala desa terhadap kebijakan netralitas. Temuan ini menyoroti pentingnya integritas pemilu dan perlindungan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan memberikan pemahaman secara mendalam tentang pentingnya netralitas, termasuk penegakan sanksi yang lebih tegas, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas kepala desa, dan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dan komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas.

Kata kunci: implementasi kebijakan, netralitas, desa.



ABSTRAK

This research aims to analyze the implementation of village head neutrality policy during elections in Dungkek District, Sumenep Regency, using the Public Policy Implementation theory of Mazmanian and Paul A. Sabatier. The study employs a qualitative approach with descriptive analysis, focusing on 1) policy implementation, 2) factors influencing policy implementation, and 3) behavior of policy implementers. The findings indicate that the implementation of the village head neutrality policy faces significant challenges. External and internal pressures make it difficult for village heads to adhere to the neutrality mandated by Law No. 7 of 2017 and Law No. 6 of 2014, as evidenced by the non-neutrality of one of the village officials. The research also identifies political pressure from political parties, familial relationships, and government intervention as the main factors influencing village heads' compliance with the neutrality policy. These findings highlight the importance of electoral integrity and the protection of the democratization process at the local level. To improve the implementation of this policy, a more systematic approach is needed, providing a deep understanding of the importance of neutrality, including stricter enforcement of sanctions, active community participation in monitoring village head neutrality, and intensive training programs to enhance the skills and commitment of village heads in maintaining neutrality.

Keywords: policy implementation, neutrality, village.

